



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
Hari, Tanggal	: Senin, 26 Maret 2018
Pukul	: 10.45 WIB – 12.45 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on corporation in the field of defence</i>).
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan)3. Meutya Viada Hafid. (F-PG)4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra)5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol.
8. Charles Honoris
9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
10. Andreas Hugo Pareira
11. Junico BP Siahaan

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

12. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.
13. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.
14. Bambang Atmanto Wiyogo
15. Venny Devianti, S.Sos.
16. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
17. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

18. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
19. H. Ahmad Muzani
20. Martin Hutabarat
21. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
22. Rachel Maryam Sayidina
23. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
24. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

25. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA
26. H. Darizal Basir.
27. Ir. Hari Kartana, M.M.
28. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

29. Ir. Alimin Abdullah
30. Budi Youyastri

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

31. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
32. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
33. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

34. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
35. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
36. Dr. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

37. Moh. Arwani Thomafi
38. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
39. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

40. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
41. Prananda Surya Paloh
42. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
43. Drs. Y. Jacki Uly, M.H.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

44. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.
45. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.A.

- Anggota yang Izin :
1. Djenri Alting Keintjem (F-PDI Perjuangan)
 2. Jimmy Demianus Ijje (F-PDI Perjuangan)
 3. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. (F-PG)
 4. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T. (F-PD)
 5. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (F-PAN)
 6. H.M. Syafrudin, S.T., M.M. (F-PAN)

- Undangan : 1. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.
2. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI M.Thamrin Marzuki.
3. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsekal Muda TNI Tata Endrata.
4. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Hartind Asrin, S.E, M.I.Kom.
5. Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri, Ricky Suhendar.
6. Kasi Harmonisasi Bidang Politik Subdirektorat Harmonisasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Arif Susandi, S.Hi.
beserta jajaran.

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati.

Selama datang kami ucapkan kepada Pemerintah yang dalam ini diwakili oleh Bapak Menteri Pertahanan, dari Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirikum dan Polkamwil Direktur HPI Bapak Ricky Suhendar, seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan menyusul nanti dari yang mewakili Menkumham.

Pada pagi hari ini, Senin 26 Maret 2018 kita akan mengagendakan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah terkait dengan pembicaraan tingkat 1 pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di bidang Pertahanan.

Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini saya perlu sampaikan bahwa *alhamdulillah*, sesuai dengan Tata Tertib DPR rapat sudah bisa kita mulai karena sudah memenuhi kuorum. Dan saya meminta kesepakatan dari para peserta Rapat Kerja pada pagi hari ini rapat bisa kita mulai dan kita adakan secara terbuka?

bisa disepakati Pak Menteri?

MENTERI PERTAHANAN (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Ya bisa disepakati.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Rapat saya buka dan dinyatakan terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)

Perlu kami sampaikan sebelumnya Pak Menteri Pertahanan dan seluruh jajaran yang lain. Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada DPR RI pada tanggal 13 Februari 2018 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. Dan menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan HAM untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang

tersebut.

Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tanggal 6 Maret juga telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tersebut.

Menindaklanjuti penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tersebut, maka Rapat Intern di Komisi I DPR RI pada tanggal 12 Maret memutuskan untuk segera melaksanakan pembahasan RUU terkait dengan Kerjasama di Bidang Pertahanan antara 2 negara ini. Dan selanjutnya pada Minggu lalu pada 21 Maret, 5 hari yang lalu kami mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mengundang berapa pakar akademisi untuk mendapatkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang Kerjasama di Bidang Pertahanan antara Indonesia dan Thailand. Sehingga kita sepakati bahwa pada pagi hari ini kita sudah bisa mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terkait Rancangan Undang-Undang tersebut.

Nah, sebelum kita mulai saya perlu menyampaikan Bapak dan Ibu semua bahwa agenda Rapat Kerja kita pada pagi hari ini terbagi dalam dua sesi, yaitu sesi pertama penjelasan Pemerintah. Kemudian dilanjutkan pemandangan umum fraksi-fraksi. Yang ketiga jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut. Dan yang keempat di sesi pertama ini, yaitu pembahasan materi DIM RUU dan penjelasan.

Setelah sesi pertama selesai maka dilanjutkan sesi keduanya, yaitu pendapat akhir mini fraksi-fraksi. Kemudian pendapat akhir Pemerintah dan pengambilan keputusan terhadap RUU dan penjelasan, diakhiri dengan penandatanganan naskah RUU dan penjelasan. Jadi ada dua sesi, kita harapkan bisa produktif pertemuan kita pada pagi hari ini dan bisa selesai tepat waktu.

Bapak dan Ibu,

Kita masuk ke sesi pertama, yaitu penjelasan Pemerintah. Kami persilakan kepada yang terhormat Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertahanan untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

Pada Pak Menteri Pertahanan saya persilakan.

MENTERI PERTAHANAN (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang saya hormati yang mewakili Menteri Luar Negeri dan Menkumham,
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan kesehatan yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

Sebagaimana diketahui bahwa RUU tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat tanggal 13 Februari 2018 dan didalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tersebut di DPR RI.

Pada kesempatan ini perkenanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan sebagai tahap awal dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini yang sebelumnya telah dikirim oleh Pemerintah untuk dibahas dalam sidang DPR RI, guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat,

Perkembangan dunia sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, yang ditandai dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta telekomunikasi yang telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Dan semakin meningkat pula kerjasama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian, termasuk kerjasama bidang pertahanan.

Hal ini sangat penting untuk menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional dewasa ini. Telah berkembang menjadi tantangan yang semakin besar dan kompleks bagi pertahanan negara. Tantangan tersebut kemudian berevolusi menjadi ancaman strategis yang bersifat *multi* dimensional, baik fisik maupun *non* fisik.

Hubungan luar negeri harus dilandasi prinsip politik bebas aktif dan saling menghargai. Dan inilah pedoman pokok dalam melaksanakan setiap hubungan kerjasama dengan negara manapun termasuk di bidang kerjasama dan diplomasi pertahanan sebagai salah satu bentuk pengejawantahan tujuan Pemerintah untuk berperan serta di dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam konteks hubungan kerjasama bilateral, hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand sudah dimulai sejak lama dan berjalan dengan sangat baik dengan dibukanya perwakilan RI di Bangkok pada tanggal 7 Maret 1950 lingkup kerjasama antar kedua negara meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan pertahanan.

Kerjasama dalam bidang pertahanan berjalan dengan baik sejak tahun 1970. Pemerintah Kerajaan Thailand telah mengirim siswa untuk ikut serta dalam Pendidikan di Sesko TNI dan Sesko Angkatan di Indonesia sebanyak 107 orang. Sedangkan Indonesia sejak tahun 1967 juga telah mengirim siswanya untuk mengikuti pendidikan serupa di Thailand dengan jumlah 133 orang.

Selain itu kegiatan latihan bersama antar Angkatan Bersenjata juga telah dilaksanakan secara rutin di samping kegiatan patroli bersama dalam rangka mengeliminir gangguan keamanan di wilayah kedua negara dalam implementasinya terdapat beberapa kerjasama serta pengamanan laut di antaranya di Teluk Thailand, Laut Sulu, Selat Malaka. Serta keikutsertaan Indonesia dan Thailand dalam penandatanganan *joint statement of our eyes* inisiatif pada bulan Februari 2018 di Singapura. Yang merupakan bentuk kerangka kerja sama pertukaran informasi strategis antar Menteri Pertahanan yang diinisiatif oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Untuk membendung penyebaran dan perkembangan terorisme di Kawasan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta telah ditandatangani persetujuan kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand. Kerjasama ini diharapkan dapat lebih mendorong kerjasama di sektor lain. Termasuk mempercepat penyelesaian damai zona ekonomi eksklusif serta sektor maritim yang juga melibatkan institusi di 2 Kementerian Pertahanan dan TNI.

Di samping itu persetujuan kerjasama ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk implementasi kerjasama pertahanan kedua pihak agar lebih produktif dan konstruktif, serta saling menguntungkan bagi kedua negara.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Beberapa bagian penting yang diatur dalam persetujuan kerjasama di bidang pertahanan ini adalah:

1. Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- a. Dialog strategis.
 - b. Pertukaran informasi.
 - c. Pertukaran kunjungan antar instansi.
 - d. Kerjasama di bidang industri pertahanan.
 - e. Kerjasama keamanan laut.
 - f. Kerjasama bidang lain yang disepakati Bersama.
2. Perlindungan terhadap informasi rahasia.
 3. Alokasi anggaran dalam pelaksanaan kerjasama.
 4. Penyelesaian perselisihan melalui konsultasi dan negosiasi.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Untuk itu, kami sampaikan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di bidang Pertahanan, guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Demikian keterangan Pemerintah terhadap rancangan Undang-Undang ini. Kami berharap RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas segala perhatian dan kerjasama ini dari Pimpinan dan semua Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Besar, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Menteri yang sudah menyampaikan penjelasan sikap dari Pemerintah.

Dan selanjutnya di sesi pertama ini kita lanjutkan untuk mendengar pandangan umum fraksi-fraksi, sehingga pada kesempatan kali ini saya mempersilakan kepada juru bicara fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kita mulai terlebih dahulu dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ibu Evita silakan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya sampaikan bahwa yang saya bacakan ini adalah butir-butir yang saya enggak penting. Jadi untuk menghemat waktu saya tidak bacakan semuanya, namun demikian naskah yang *full* akan kita serahkan langsung kepada Menteri Pertahanan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo budaya.

MERDEKA!!!

Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang mewakili Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati, Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memang tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan negara lain dalam upaya mewujudkan kepentingan nasionalnya. Hubungan atau keterkaitan dengan negara lain dapat dilakukan dalam bentuk diantaranya adalah melalui perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Perlunya pengesahan dalam bentuk Undang-Undang terhadap persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand adalah berpedoman kepada ketentuan Pasal 10 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara.

Dan sesuai dengan substansi yang terkandung dalam persetujuan tersebut, maka pembahasan RUU ini diserahkan kepada Komisi I DPR RI yang salah satu tugasnya adalah terkait dengan masalah pertahanan.

Salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah Kerajaan Thailand, kerjasama antara kedua negara diwujudkan dalam bentuk persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang kerjasama di bidang pertahanan (*agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on cooperation in the field of defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, yang perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Prinsip-prinsip penting dari persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand ini adalah:

- a. Persetujuan dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara melalui kerjasama di bidang pertahanan dalam semangat ASEAN saling percaya dan pengertian.
- b. kedua pihak menyadari kepentingan bersama dalam mempromosikan hubungan, baik dalam persahabatan dan kerjasama timbal balik dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran antara masyarakat kedua negara.
- c. Bahwa penguatan kerjasama pertahanan akan berkontribusi pada hubungan yang saling menguntungkan bagi pertahanan nasional kedua negara.
- d. Persetujuan ini berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan Undang-Undang yang berlaku di kedua negara.

Beranjak dari pemahaman inilah maka kita semua sepakat bahwa kerjasama di bidang pertahanan dengan negara lain termasuk dengan Pemerintah Kerajaan Thailand merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Namun, dalam membuat perjanjian atau persetujuan dengan negara lain, fraksi PDI Perjuangan DPR RI menekankan bahwa kepentingan nasional Indonesia tetap harus menjadi perhatian utama dari Pemerintah maupun semua pihak terkait.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami dari fraksi PDI Perjuangan DPR RI siap untuk membahas dan mendalami RUU ini bersama dengan fraksi-fraksi lain, demikian juga dengan Pemerintah sebab kami menganggap bahwa pengesahan terhadap persetujuan ini perlu segera dilakukan sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan pertahanan Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
MERDEKA!!!

Jakarta, 26 Maret 2018

Ketua Poksi I Fraksi PDI Perjuangan

Evita Nursanty, M.Sc.
A-171

Izin untuk menyerahkan ini kepada Pemerintah.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Silakan Ibu.

Terima kasih Ibu Dr. Evita Nursanty, M.Sc.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar, kami persilakan kepada Bapak Bobby.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.):

**Pandangan Umum
Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik of
Indonesia and Government of the Kingdom of Thailand on cooperation in the field of
defence*)**

Dibacakan oleh : Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., M.B.A., C.F.E.

Nomor Anggota : A-246

Dapil Pemilihan : Sumatera Selatan II

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om swasti astu,

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Rapat Kerja Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta jajaran,
Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran,
dan para Anggota Komisi I DPR RI,
serta hadirin sekalian yang kami hormati.**

Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya untuk kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti Rapat Kerja dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang kerjasama di bidang Pertahanan.

Selanjutnya perkenankan kami dari fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan pandangan umum mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati,

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara, kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Selain itu, perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut semakin meningkat pula kerjasama internasional tersebut Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional. Hal ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain.

Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand telah bersepakat untuk melakukan kerjasama di bidang pertahanan. Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat bahwa kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand di bidang pertahanan sangat penting dan diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan antar kedua negara, meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral, daya dukung serta daya saing industri pertahanan nasional.

Selain itu kerjasama ini merupakan salah satu bentuk usaha nyata Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosia.

Atas dasar itulah maka Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang kerjasama di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, Indonesia mutlak diperlukan dan segera diratifikasi untuk lebih meningkatkan efektivitas kerjasama antar kedua negara dalam melakukan kerja sama di bidang pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan *bismillahirohmanirrohim*, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang kerjasama di bidang pertahanan untuk dapat dibahas pada tingkat lebih lanjut.

Demikian pemandangan umum Fraksi Partai Golkar DPR RI semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk serta rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam usaha menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 26 Maret 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Melchias Markus Mekeng

Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita

Ketua

Sekretaris

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih saudara Bobby sudah menyampaikan pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar.

Yang berikutnya adalah kesempatan itu Fraksi Gerindra dan Pak Menteri kami sampaikan Fraksi Gerindra pandangan umumnya sudah disampaikan ke meja Pimpinan. Dan saya perlu sampaikan bahwa Fraksi Gerindra pada intinya juga menyepakati dan setuju bahwa RUU ini untuk dibahas lebih lanjut, karena teman-teman dari Fraksi Gerindra ada acara di Fraksi.

Sehingga saya lanjutkan berikutnya giliran Fraksi Partai Demokrat.
Pada Pak Hari silakan.

F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pandangan Umum
Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik of
Indonesia and Government of the Kingdom of Thailand on cooperation in the field of
defence*)**

Juru bicara : Ir. Hari Kartana
Nomor Anggota : A-418

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Hadirin yang kami hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Setelah mempelajari, mendengarkan, memperhatikan dan mencermati apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Pertahanan, terkait dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan tersebut. Fraksi Partai Demokrat berpandangan sebagai berikut:

Pertama, secara filosofis kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Indonesia

Dan Pemerintah Kerajaan Thailand merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama yang diputuskan dalam perjanjian internasional.

Kedua, secara yuridis menurut prosedur internal yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersilakan oleh perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itulah, persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang kerjasama dibidang pertahanan harus dibentuk dengan Undang-Undang sebagai dasar hukum pelaksanaan kerjasama.

Ketiga, secara sosiologis kerjasama pertahanan merupakan instrumen penting dari diplomasi pertahanan Republik Indonesia. Hal ini berlaku juga dalam hubungan bilateral di bidang pertahanan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand. Kerjasama tersebut antara lain dalam hal pertukaran informasi, kerjasama militer, pendidikan dan pelatihan, saling kunjung antar pejabat pertahanan kedua negara dan lain-lainnya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta hadirin yang terhormat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Fraksi Partai Demokrat memandang RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan adalah positif dan perlu didukung. Namun demikian, perjanjian pertahanan dalam isi dan bentuknya harus memberikan jaminan keseimbangan bahwa tidak ada kewenangan bagi salah satu pihak untuk melakukan intervensi ke dalam urusan domestik yang lainnya.

Demikian pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ridho-Nya pada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 26 Maret 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Demokrat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ketua

Sekretaris

Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Si.
A-434

Didik Supriyanto, S.H., M.H.
A-437

Demikian Pak Ketua dan mohon nanti dokumen aslinya akan kami sampaikan menyusul. Demikian kami sampaikan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Hari Kartana sudah menyampaikan dari Fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional kami persilakan Saudara Budi Youyastri.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Terima kasih Pimpinan.

**Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Bapak Menteri Pertahanan dan Wakil Pemerintah.**

**Pandangan Umum
Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik of
Indonesia and Government of the Kingdom of Thailand on cooperation in the field of
defence*)**

Nomor satu, catatannya bahwa kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Menteri Pertahanan sebagai Wakil Pemerintah. Dan yang kedua, kita juga punya catatan bahwa menurut data *Global Fire Index 2017* Thailand itu punya kapal induk. Dan yang kedua, anggaran pertahanan dia 1,4 sampai 2% dari PDB-nya.

Jadi saya pikir, kami pikir bahwa Thailand layak untuk dijadikan mitra bagaimana membangun pertahanan bersama terutama di laut China Selatan. Jadi kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional menyepakati untuk dilanjutkan pembahasan di tingkat selanjutnya.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih saudara Budi Youyastri.
Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Sudah ada belum?
Kita pas dulu.
Selanjutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ketua yang langsung menyampaikan.
Silakan Bapak Ketua.

F-PKS/KETUA KOMISI I (Dr. H. ABDUL KHARISALMASYHARI):

**Pandangan Umum
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik of
Indonesia and Government of the Kingdom of Thailand on cooperation in the field of
defence*)**

Disampaikan oleh : Dr. H. Abdul Haris Almasyhari
Nomor anggota : A-111

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.

Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rosululloh Nabi Muhammad SAW insan yang telah mengajarkan kita untuk saling mengenal dan bekerja sama antar bangsa-bangsa dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri, serta hadirin yang kami hormati.

Saya tidak bacakan semuanya untuk pandangan ini dan langsung pada poin terakhirnya.

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand, untuk dibawa ke pembicaraan tingkat I untuk dibahas bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban bukan hanya bagi seluruh warga negara Indonesia tapi juga warga di kawasan Asia Tenggara. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara.

Atas perhatian Pimpinan, Anggota, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri serta hadirin semua, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ketua

Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.

Sekretaris

H. Sukamta, Ph.D.

Selengkapnya akan kami serahkan kepada Pimpinan dan Menteri.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Ketua sudah menyampaikan pandangan umum mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Yang selanjutnya untuk Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Saudara Arwani Thomafi dipersilakan.

F-PPP (MOH. ARWANI THOMAFI):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua.

**Pandangan Umum
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik of
Indonesia and Government of the Kingdom of Thailand on cooperation in the field of
defence*)**

Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Senin 26 Maret 2018 oleh juru bicara Fraksi PPP DPR RI Arwani Thomafi.

**Yang kami hormati Pimpinan Sidang, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur *Alhamdulillah*, karena atas perkenan Allah kita dapat melangsungkan Rapat Kerja pada hari ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat pengikutnya.

Selanjutnya izinkanlah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyampaikan beberapa hal secara poin-poin yang penting saja kami sampaikan pada kesempatan kali ini.

Yang pertama, bahwa Fraksi PPP memandang bahwa stabilitas keamanan regional ataupun juga secara umum ketertiban dunia akan dapat dicapai bila masing-masing negara mendahulukan atau memprioritaskan bentuk kerjasama, baik itu secara internasional, bilateral maupun multilateral. Adanya persetujuan itu untuk kerjasama di bidang pertahanan akan memperkuat kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara yang persetujuan tersebut, karena tentu persetujuan itu berarti pengakuan akan kedaulatan dan kemerdekaannya.

Selain itu, persetujuan di bidang pertahanan akan mencegah konflik dan sengketa, baik secara langsung di antara negara yang membuat persetujuan maupun secara tidak langsung dengan negara-negara sahabat dari negara para pihak.

Yang kedua, Fraksi PPP memandang persetujuan kerjasama pertahanan dengan Thailand juga diperlukan, karena negara tersebut merupakan negara tetangga yang telah mengikat hubungan erat dalam ASEAN, termasuk juga kedekatan geografis. Kedua negara ini perlu menjalin berbagai kerjasama yang lebih operasional dan teknis.

Terlebih Indonesia dan Thailand bersama dengan negara-negara ASEAN yang lain, yaitu Malaysia juga sudah menjalin kerjasama trilateral untuk pengamanan Selat Malaka. Kerjasama tersebut berhasil menurunkan berbagai ancaman keamanan seperti penyelundupan orang, barang, perompakan terorisme dan terorisme di laut dan sebagainya.

Yang ketiga, Fraksi PPP juga memandang sudah tepat kiranya persetujuan kerjasama pertahanan ini dilanjutkan dalam ratifikasi dalam bentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dengan berbagai pertimbangan di atas Fraksi PPP DPR RI menyatakan setuju untuk membahas RUU ini bersama dengan Pemerintah dan Fraksi-Fraksi lain DPR RI.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PPP DPR RI dan atas perhatian Pimpinan, para menteri dan segenap Anggota Komisi I DPR RI kami sampaikan terima kasih.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Kapoksi I

Arwani Thomafi

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bapak Arwani sudah menyampaikan pandangan umum dari Fraksi PPP. Selanjutnya Fraksi Nasdem kepada Prof. Bachtiar Aly saya persilakan.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Bachtiar Aly, Nomor Anggota A-01.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kecerdasan akal, kejernihan kalbu dan kelamaan waktu sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Kerja ini dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of Republic of Indonesia and Government of The Kingdom of Thailand and cooperation I field of defence*).

Seperti kita ketahui sejumlah Undang-Undang sudah mengatur perjanjian kerjasama antara Republik Indonesia dengan pihak lain dengan cukup rinci. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 11 Ayat (2) menyebutkan perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atas pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR RI. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, disebutkan bahwa dalam Pasal 6 Ayat (1) bahwa penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia, namun perjanjian dengan negara lain memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga telah diatur perjanjian internasional disahkan dengan Undang-Undang, apabila berkenaan dengan antara lain masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara.

Sesuai dengan aturan yang berlaku setelah ditandatangani kedua perjanjian dengan negara sahabat, maka persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang kerjasama di bidang pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2015 oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Kerajaan Thailand wajib kita bahas bersama untuk dipelajari apakah akan diratifikasi atau tidak.

Hadirin yang kami hormati,

Sebelum perjanjian ditandatangani pada tahun 2015, Indonesia dan Thailand sudah menjalani sejumlah bentuk kerjasama di bidang pertahanan, diantaranya adalah saling kunjung pejabat pertahanan kedua negara, pertukaran siswa dalam mengikuti pendidikan militer di kedua negara, hingga adanya Thailand-Indonesian *high level sub committee*, yang memiliki 3 *sub committee*, yaitu *joint intellijent sub committee*, *joint cooperation and exercise committee* dan *joint education and training sub committee*.

Thailand telah melakukan sejumlah peningkatan kapasitas pertahanan. Pada tahun 2014 anggaran pertahanannya adalah sebesar 5,7 Juta US Dolar, tidak banyak dibawah anggaran pertahanan di Indonesia di tahun yang sama, yaitu sekitar Rp7 miliar US Dolar per tahun. Thailand menganggarkan 1,5% dari produk domestik bruto untuk belanja militer dan pertahanan. Anggaran tersebut meningkat 5% di tahun 2016 yang berjumlah 6,5 miliar US Dolar. Tahun 2017 kemarin Thailand berencana membeli 3 kapal selam dan 10 tank dari Tiongkok tambahan dari tank yang sudah didatangkan dari Ukraina. Di bawah triwulan pertama 2018 ini angkatan bersenjata Thailand *royal thai army* menjadwalkan menjalani uji coba kendaraan militer dari automotif Abu Dhabi, yang spesifikasinya akan disesuaikan dengan kontur alat *local* Thailand. Uji coba ini adalah kerja sama antara perusahaan swasta di Thailand yang bergerak di bidang industri pertahanan.

Masifnya pembaharuan yang dilakukan Thailand dibidang pertahanan menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan kapasitas militer dan pertahanan dan mempertahankan posisi strategisnya di forum internasional. Realita ini menunjukkan bahwa Thailand adalah rekanan yang setara untuk melakukan transfer teknologi dan inovasi bersama dalam ranah kekuatan militer dan pertahanan.

Skema pendanaan yang disepakati bersama memungkinkan terjadi hal tersebut tanpa memberatkan anggaran nasional masing-masing negara. Indonesia dan Thailand tidak berbatasan langsung, namun secara geografis kedua negara memiliki kepentingan strategis yang sama, terutama dalam kaitan keamanan laut. Keduanya berkepentingan dalam stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan, keduanya memiliki wilayah zona ekonomi eksklusif yang berdekatan bahkan ada yang berbatasan langsung, ada yang sudah diselesaikan perundingannya, ada pula yang belum. Selain itu disinyalir bahwa organisasi dipaksa bekerja di atas kapal selama berbulan-bulan di perairan di kedua negara.

Perjanjian yang ada membuka pintu bagi kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan strategis terkait keamanan laut kedua negara.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hal diatas, Fraksi Partai Nasdem Republik Indonesia setuju membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang kerjasama di Bidang Pertahanan.

Fraksi Partai Nasdem DPR RI menggarisbawahi bahwa pembicaraan mengenai ratifikasi ini harus berjalan dalam bingkai azas kedaulatan kesetaraan, timbal balik, saling menghormati, itikad baik, kepastian hukum dan saling manfaat sehingga ratifikasi ini betul-betul berkontribusi positif pada Indonesia.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di bidang Pertahanan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahman hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 26 Maret 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Nasdem
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Sekretaris

Wakil Sekretaris

**A. Syarif Abdullah Alkadr
A-29**

**Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
A-12**

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Prof. Bahtiar.

Sebelum Fraksi Hanura, saya perlu sampaikan Pak Menteri bahwa tadi Fraksi PKB terlewati dan menyusulkan sikapnya bahwa Fraksi PKB menyatakan menyetujui untuk membahas RUU ini dilanjutkan pada pembahasan berikutnya.

Yang terakhir kepada Fraksi Hanura, saya persilakan Mas Arief Suditomo.

F-HANURA (MOHAMAD ARIEF SUDITOMO, S.H., M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pandangan Umum
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik of
Indonesia and Government of the Kingdon of Thailand on corporation in the field of
defence*)**

Dibacakan oleh : Moh. Arief Suditomo, S.H., M.H.

Nomor Anggota : A-550

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,
Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,
hadirin sekalian yang berbahagia.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Saatnya Hati Nurani bicara.

Kerjasama internasional di bidang pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hubungan diplomatik Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand telah berlangsung sejak tanggal 7 Maret 1950. Dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand menandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand dalam

kerjasama di bidang pertahanan (*agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on corporation in field of defence*) pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta.

Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan hal tersebut Fraksi Partai Hanura DPR RI berpandangan sebagai berikut:
Kerjasama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand harus dapat bermanfaat dalam penanganan tindak pidana terorisme, dan mendukung serta senantiasa membela kepentingan nasional. Kerjasama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand dapat mempererat hubungan bilateral terutama di bidang pertahanan, strategis dan militer. Ketiga, kerjasama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand merupakan cakupan penting dalam pengamanan perbatasan laut dari kedua negara.

Hadirin yang kami hormati,

Setelah melakukan kajian dan melakukan sebuah pembahasan komprehensif, maka Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan atau (*agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on corporation in field of defence*) untuk dapat dilakukan pembahasan dan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan serta Tata Tertib DPR RI.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Hanura DPR RI kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Billahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 26 Maret 2018

Kapoksi Komisi I Fraksi Hanura

Moh. Arief Suditomo, S.H., M.H.
A-550

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Mas Arief.

Jadi 10 Fraksi setelah kita mendengar pandangan umum fraksi-fraksi. Kita bisa simpulkan Pak Menteri bahwa seluruh Fraksi di Komisi I DPR RI menyetujui untuk membahas RUU ini dibahas dengan Pemerintah. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk pada agenda pembahasan materi DIM RUU dan penjelasan, saya persilakan kepada Pak Menteri untuk memberi tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi tadi.

MENTERI PERTAHANAN (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Terima kasih Pimpinan.

Saya atas nama Kementerian Pertahanan dan Pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan yang bertujuan untuk membahas Undang-Undang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bapak Menteri.

Kita bisa lanjutkan dengan demikian untuk masuk pada pembahasan materi DIM RUU dan penjelasan. Nah, sebelum kami masuk pada agenda berikutnya ini Pak Menteri kami perlu perkenalkan bahwa di Komisi I ini hadir di tengah-tengah kita Anggota baru, kami perkenalkan Bapak Drs. Jacky Uly, M.H. dari Fraksi Nasdem, Dapil NTT 2, penggantinya Pak Victor.

Bapak dan Ibu sekalian,

Sesuai dengan materi yang kita sepakati di awal tadi itu bahwa sekarang kita masuk pada pembahasan materi DIM Rancangan Undang-Undang dan penjelasan. Jadi di hadapan kita ini akan ada 2 DIM, yang pertama adalah DIM RUU dan yang kedua adalah DIM Penjelasan.

Nah, kita akan membahas DIM RUU-nya terlebih dahulu nanti akan kami bacakan Daftar Inventarisasi Masalahnya satu per satu sesuai dengan nomor urut yang ada dihadapan kita semua. Sesuai dengan naskah Rancangan Undang-Undang dan kita meminta persetujuan dari seluruh peserta rapat untuk dibahas satu per satu.

Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu DIM RUU. Nomor DIM yang pertama:

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor kosong tahun Kosong tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on corporation in field of defence*)

Bisa disetujui DIM pertama nama Rancangan Undang-Undangnya, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM yang kedua. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM ketiga. Menimbang A bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM keempat B, bahwa untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta Indonesia telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the field of defense*).

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM kelima C, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM yang keenam D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B dan huruf C, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between the Government of dari Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on cooperation in the Field of defense*).

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7, mengingat: 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM kedelapan, Angka 2: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 9, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 10, menetapkan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Corporation in the Field of defence*).

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 11, Pasal 1.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 12, Angka 1 mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Corporation in the Field of defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta-Indonesia.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 13, Angka 2 salinan naskah asli persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Corportion in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Thai dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 14, Pasal 2.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 15, Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 16, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 17, disahkan di Jakarta pada tanggal kosong, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 18, diundangkan di Jakarta pada tanggal kosong, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Laoly.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM terakhir di DIM RUU nomor 19, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun kosong Nomor menyusul.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu,

Jadi bahan untuk DIM RUU-nya sudah kita selesaikan, kita setuju semuanya dan kita sekarang masuk pada DIM Rancangan Penjelasan. Ada 3 halaman, kita bahas mulai nomor 1.

DIM yang pertama nomor angka 1, Rancangan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor kosong Tahun kosong tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Corporation in the Field of Defence*).

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2 I Umum.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3, Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/ atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 4, seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerjasama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 5, kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand diwujudkan dalam bentuk persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Corporation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2012 di Jakarta Indonesia yang selanjutnya disebut dengan persetujuan perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 6, materi muatan dalam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertanian antara lain.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 7, 1. ruang lingkup kerjasama meliputi:

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 8, a. dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu pertahanan strategis dan militer yang menjadi kepentingan bersama.

Sepakat, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 9, b. Pertukaran informasi tentang kelembagaan dan urusan pertahanan.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 10, c. Pertukaran kunjungan antar instansi pertahanan dan angkatan bersenjata.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 11, d. Peningkatan kerja sama antar kedua angkatan bersenjata.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 12, e. Kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 13, f. Kerjasama dalam keamanan laut.
Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 14, g. Kerjasama di bidang lain yang disepakati bersama oleh para pihak.
Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 15, angka 2 kewajiban melindungi informasi rahasia sesuai dengan hukum nasional dan peraturan dari para pihak.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 16, angka 3 biaya akan ditanggung masing-masing pihak terkait dengan pelaksanaan persetujuan kecuali disepakati lain oleh para pihak.
Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 17, angka 4 perselisihan yang timbul terkait penafsiran atau pelaksanaan dari persetujuan ini diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi di antara para pihak.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 18, II Pasal demi pasal.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomo 19, Pasal 1 cukup jelas.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomo 20, Pasal 2 cukup jelas.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor menyusul.
Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM RUU dan DIM Penjelasan sudah kita sepakati, kita ketuk semuanya Pak Menteri dan Bapak dan Ibu semuanya, sehingga sesi pertama sudah selesai. Kita sekarang masuk pada sesi kedua, yaitu kita akan mempersilakan kembali kepada para juru bicara Fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir mini fraksi, sesuai dengan urutan tadi.

Saya persilakan dari fraksi PDI Perjuangan Ibu Dr. Evita Nursanty.
Diganti ya, oke saya persilakan kepada Bapak Junico.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN):

Baik, terima kasih Ketua.

Pak Menteri yang kami hormati,

Kami akan membacakan poin-poin penting saja yang sudah kami siapkan untuk dibacakan pada pagi hari ini.

**Pendapat Akhir Mini
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik Of
Indonesia and Government of the Kingdon of Thailand on corporation in the field of
defence*)**

Dibacakan oleh : Juico BP Siahaan, S.E.

Nomor Anggota : A-151

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo Budaya.

MERDEKA!!!

**Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Setelah menjalani serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum dari berbagai kalangan dan Rapat Dengar Pendapat serta Rapat Kerja dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement between government of Republik Of Indonesia and Government of the Kingdon of Thailand on corporation in the field of defence*). Maka tibalah saatnya kami memberikan pendapat akhir sebagai wadah bagi Fraksi-fraksi untuk menyatakan sikap.

Menyadari pentingnya kerjasama pertahanan dengan negara lain, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat bahwa dalam menjalin kerjasama ini kepentingan nasional Indonesia tetap harus menjadi perhatian utama dari Pemerintah maupun semua pihak yang terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mencatat beberapa masalah penting untuk mendapat perhatian kita bersama, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini nantinya Pemerintah Indonesia agar berpegang teguh pada prinsip bahwa persetujuan tersebut harus berdasarkan pada persamaan keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan negara.
2. Kewajiban melindungi informasi rahasia sesuai dengan hukum nasional dan peraturan dari para pihak.
3. Perselisihan yang timbul terkait penafsiran atau pelaksanaan dari persetujuan ini diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi di antara para pihak.

4. Persetujuan ini hendaknya bermanfaat bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan pertahanan Indonesia secara komprehensif sesuai dengan lingkup kerjasama, yaitu:
 - a. Dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu pertahanan strategis dan militer yang menjadi kepentingan bersama.
 - b. Pertukaran informasi tentang kelembagaan dan urusan pertahanan.
 - c. Pertukaran kunjungan antar instansi pertahanan dan angkatan bersenjata.
 - d. Peningkatan kerjasama antara kedua angkatan bersenjata.
 - e. Kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan.
 - f. Kerjasama dalam keamanan laut.
 - g. Kerjasama di bidang lainnya yang disepakati bersama oleh para pihak.

Demikianlah beberapa catatan yang perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan persetujuan ini. Dan pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan agar Rancangan Undang-Undang tentang persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik Of Indonesia and Government of the Kingdom of Thailand on corporation in the field of defence*) disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada Rapat Paripurna Dewan untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

Akhir kata melalui kesempatan berbahagai ini kami ucapkan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran yang mewakili Pemerintah.

Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada para pakar, pemerhati pertahanan, rekan-rekan wartawan dan semua pihak yang telah memberikan masukan pendapat dan bantuan, sehingga Rancangan Undang-Undang dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MERDEKA!!!

Izinkan untuk menyerahkan kepada Pak Menteri.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bapak Nico sudah menyampaikan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Selanjutnya Fraksi Partai Golkar, saudara Bobby.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pendapat Akhir Mini
Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik Of
Indonesia and Government of the Kingdon of Thailand on corporation in the field of
defence*)**

Dibajakan oleh : Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., M.B.A., C.F.E.
Nomor Anggota : A-246
Daerah Pemilihan : Sumatera Selatan II.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Swasti Astu,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Kerja Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta jajaran, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta jajaran, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajaran, dan para Anggota Komisi I DPR RI, Serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama untuk mengikuti Rapat Kerja dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Mini fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

Selanjutnya perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Golkar DPR RI ingin menyampaikan pendapat akhir mini mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia,

Mencermati Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pemerintah dalam Rapat Kerja. Fraksi Partai Golkar DPR RI menggarisbawahi beberapa poin penting, yaitu:

1. Persetujuan di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengatur ruang lingkup kerjasama yang meliputi dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu pertahanan strategis dan militer yang menjadi kepentingan bersama. Pertukaran informasi tentang kelembagaan dan urusan pertahanan, pertukaran kunjungan antar instansi pertahanan dan angkatan bersenjata, peningkatan kerjasama antara kedua angkatan bersenjata, kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan, kerja sama dalam keamanan laut dan kerja sama di bidang lain yang disepakati bersama oleh para kedua belah pihak.
2. Sebagai salah satu negara sahabat di mana hubungan antara kedua negara telah terjalin dengan sangat baik, secara politis Kerajaan Thailand memiliki arti penting bagi Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam memperkuat posisi diplomasi Indonesia, baik dalam hubungan di kawasan regional maupun internasional.
3. Pengesahan Rancangan Undang-Undang ini juga sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kementerian, lembaga terkait seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, diharapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Kerjasama di Bidang Pertahanan ini dapat diselesaikan tepat waktu demi terwujudnya akuntabilitas menuju tata kelola Pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan kerangka berpikir itu Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan *bismillahirrohmaanirrohiim*, menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar DPR RI, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk serta rahmat dan ridho-Nya

kepada kita semua dalam usaha menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 26 Maret 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Golkar
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Melchias Markus Mekeng

Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita

Ketua

Sekretaris

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bapak Bobby dari Fraksi Partai Golkar.
Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra Bapak Asril.

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI I (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pendapat Akhir Mini
Fraksi Partai Gerindra
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik Of
Indonesia and Government of the Kingdon of Thailand on corporation in the field of
defence*)**

Dibacakan oleh : Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung
Nomor Anggota : A-340

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian,
Shalom,
Om swasti astu,
Namo Budaya.

**Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam Rapat Kerja mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

Semoga langkah-langkah yang akan kita ambil dalam rangka pengambilan keputusan berkaitan dengan RUU ini menghasilkan keputusan terbaik dan mendapatkan ridho Allah SWT untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Pimpinan Sidang dan hadirin kami hormati,

Hubungan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand terus meningkat dalam kerangka bilateral maupun regional. Hal ini dapat kita lihat sejak dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara pada tanggal 7 Maret 1950. Lalu sama-sama mendirikan sekaligus menjadi anggota dari *Association of South East Asian National* di Bangkok Ibukota Kerajaan Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967.

Menandatangani perjanjian mengenai penetapan garis batas dasar laut di laut Andaman pada tanggal 11 Desember 1973. Dan berbagai hubungan bilateral lainnya. Hubungan terus terjalin antara Indonesia dan Thailand hingga saat ini, membuktikan bahwa hubungan kedua negara sangat erat.

Hubungan yang erat ini diantara kedua negara tersebut dalam bidang pertahanan, hal ini dapat terlihat dari pertemuan panglima angkatan bersenjata Thailand dengan Presiden Republik Indonesia disela-sela penyelenggaraan *Work Conference* di Manado 2009 yang lalu. Hingga berbagai kunjungan dari pejabat pertahanan kedua negara serta *student exchange* dalam pendidikan militer yang telah dilaksanakan sejak tahun 1970.

Inilah juga yang mendasari forum Indonesian-Thailand *High Level committee*, yaitu kerjasama militer kedua angkatan bersenjata yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2007 dan berganti nama pada tahun 2013 *Thainesian High Level Committee*.

Hubungan ini terasa semakin erat lagi dengan dicapainya persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2015 yang lalu. Yang kemudian diikuti dengan penyelenggaraan *Thianesian High Level Committee* ke-9 di Bangkok Thailand pada tanggal 17 September 2015.

Persetujuan inilah yang meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Thailand termasuk di dalamnya daya dukung dan daya saing industri pertahanan yang semakin kuat dan strategis.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami banggakan,

Di era abad ke-21 ini perkembangan teknologi telah menyebabkan sebuah wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas. Sehingga memudahkan perpindahan manusia dan barang dari satu negara ke negara lain. Perkembangan ini selayaknya diikuti perkembangan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan perkembangan zaman. Meskipun Kerajaan Thailand adalah negara tetangga Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut dan juga merupakan mitra strategis negara Republik Indonesia. Namun, kemajuan teknologi dan tingginya intensitas hubungan diantara kedua negara tentunya memerlukan ketersediaan perangkat dalam mekanisme kerjasama yang dapat mengatasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

Oleh karena itu, Partai Gerakan Indonesia Raya berharap persetujuan yang telah ditandatangani tersebut dapat diikuti dengan peran serta kedua negara dalam menyelesaikan persoalan delimitas zona ekonomi eksklusif dan persoalan di sektor maritim lainnya. Persoalan pertahanan termasuk mengatasi berbagai ancaman militer, ancaman perang asimetris, yang berasal dari antar negara atau *non-state actor* dan permasalahan lainnya di bidang pertahanan, termasuk penanganan pelanggaran hukum laut.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak pandangan Pemerintah, aspirasi yang berkembang selama pembahasan RUU ini, maka

Fraksi Partai Gerindra menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik Of Indonesia and Government of the Kingdon of Thailand on corporation in the field of defence*) dibawa ke tingkat selanjutnya untuk disahkan.

Demikian pandangan mini akhir fraksi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 26 Maret 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ketua

Wakil Sekretaris

Edi Prabowo, M.B.A.

Ir. Hendro Hermono, M.B.A.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bapak Asril dari Fraksi Partai Gerindra.
Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pendapat Akhir Mini
Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik Of
Indonesia and Government of the Kingdon of Thailand on corporation in the field of
defence*)**

Dibacakan oleh : Ir. Hari Kartana
Nomor Anggota : A-418

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Hadirn sekalian yang berbahagia.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Dalam kesempatan ini kami akan membacakan beberapa poin penting saja, sehingga akan lebih menghemat waktu, karena pada prinsipnya dari Fraksi Partai Demokrat menyetujui.

Pertama, secara umum kerjasama di bidang pertahanan ini merupakan bagian dari

pengamalan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kedua, kerjasama ini akan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan hubungan bilateral yang sudah terbina sejak lama, khususnya di bidang pertahanan.

Ketiga, ratifikasi persetujuan kerjasama pertahanan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand akan memberi bobot legal politik dan diplomasi yang lebih baik dalam hubungan Indonesia dengan Thailand. Namun demikian, saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta hadirin yang terhormat, kerjasama di bidang pertahanan ini mengharuskan adanya persyaratan:

1. Adanya aturan transparansi atau komunikasi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.
2. Adanya pengaturan yang ketat di mana masing-masing pihak tidak melakukan tindakan provokatif yang mengundang tindakan reaktif militer.
3. Adanya deklarasi bersama, yaitu kerangka upaya efektif untuk mencegah konflik atas dasar prinsip bersama yang diakui dan dipatuhi bersama melalui kesepakatan untuk tidak menggunakan kekuatan militer sebagai alternatif utama ketika terjadi perselisihan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta hadirin yang terhormat.

Sehubungan dengan point-point tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional harus dilakukan dalam bentuk Undang-Undang, Apabila berkenaan dengan salah satunya yaitu masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, maka Fraksi Partai Demokrat setuju agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan didukung dan dibahas pada pembicaraan yang lebih lanjut.

Demikian pendapat mini akhir Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ridho-Nya pada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 26 Maret 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Demokrat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ketua

Sekretaris

Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Si.
A-434

Didik Supriyanto, S.H., M.H.
A-437

Demikian Pak Ketua dan mohon nanti dokumen aslinya akan kami sampaikan menyusul. Demikian kami sampaikan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Hari Kartana dari Fraksi Partai Demokrat.
Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional kami persilakan Saudara Budi Youyastri.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Terima kasih Pimpinan.

**Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Bapak Menteri Pertahanan dan Wakil dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian
Hukum dan HAM.**

**Pandangan Mini Akhir
Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik of
Indonesia and Government of the Kingdom of Thailand on corporation in the field of
defence*)**

Dibacakan oleh : Budi Youyastri.
Nomor ANggota : A-476
Daerah Pemilihan : Jabar X.

Bismillahirrahmanirrahim.

**Pimpinan sekalian,
Bapak Menteri dan Anggota Dewan yang terhormat.**

Jadi Fraksi Partai Amanat Nasional memandang bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Thailand memiliki arti strategis. Persetujuan kerjasama yang telah ditandatangani 21 Mei 2015 merupakan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral. Jadi Fraksi PAN memandang bahwa Thailand merupakan negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup diperhitungkan. Yang seperti disampaikan bahwa anggaran militer mereka 1,5% sampai 2% dari PDB-nya.

Berdasarkan uraian dan pandangan yang dibacakan dan sudah kita bahas di dalam DIM, maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmaanirrahim*, memohon ridho Allah SWT, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama Pertahanan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui pembicaraan tingkat 2.

Demikian pandangan Akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang ini.

Sekian, terima kasih.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 26 Maret 2018

**Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Hanafi Rais

Syafrudin

Wakil Ketua

Wakil Sekretaris

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Mas Budi dari Partai Amanat Nasional yang telah menyampaikan pandangan akhir mini Fraksinya.

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Fraksi PKB sudah menyerahkan juga pandangan akhir mini Fraksi. Yang isinya adalah Fraksi PKB menyatakan menyetujui RUU kedua negara ini untuk selanjutnya dibawa dalam pembicaraan tingkat II. Jadi sama sepakat untuk dibahas di Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Berikutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Ketua silakan.

F-PKS/KETUA KOMISI I (Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

**Pendapat Akhir Mini
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik Of
Indonesia and Government of the Kingdon of Thailand on corporation in the field of
defence*)**

Disampaikan oleh : Dr. H. Abdul Haris Almasyhari

No Anggota : A-111

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri serta hadirin yang kami hormati.

Upaya menjaga stabilitas keamanan Kawasan Asia Tenggara harus terus menjadi fokus bagi negara-negara Asia Tenggara yang tergabung ke dalam *association of southeast Asia Nation* stabilitas keamanan Kawasan merupakan kunci bagi berkembangnya aspek-aspek lain seperti aspek ekonomi.

Tanpa stabilitas keamanan mustahil perekonomian suatu negara dapat meningkat dengan baik. Oleh sebab itu, langkah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand dalam menjalin kerjasama pertahanan melalui persetujuan yang ditandatangani pada 2015 lalu patut diapresiasi. Dan persetujuan tersebut kedua belah pihak telah memahami bahwa kerjasama pertahanan ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran antaraa masyarakat kedua negara.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa tujuan persetujuan tersebut terpapar dengan baik dalam ruang lingkup persetujuan kerjasama yang mencakup:

1. Dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu pertahanan strategis dan militer yang menjadi kepentingan Bersama.

2. Pertukaran informasi tentang kelembagaan dan urusan pertahanan.
3. Pertukaran kunjungan antara instansi pertahanan dan angkatan bersenjata.
4. Peningkatan kerjasama antara angkatan bersenjata.
5. Kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan.
6. Kerjasama dalam keamanan laut.
7. Kerjasama dalam bidang lain yang disepakati Bersama oleh para pihak.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri serta hadirin yang kami hormati.

Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand dibidang pertahanan memang sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan militer kedua belah pihak. Namun, satu hal yang sangat penting dan krusial yang perlu ditekankan adalah kerjasama pertahanan ini harus benar-benar digunakan untuk melindungi masyarakat di kedua negara.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa setiap kebijakan luar negeri Indonesia termasuk bidang pertahanan harus memiliki peran Indonesia dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Salah satu upaya turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian di dunia adalah menciptakan stabilitas ketertiban dan keamanan yang kokoh dikawasan Asia Tenggara.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri serta hadirin yang kami hormati.

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan diatas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama dibidang Pertahanan segera dapat dibawa ke Paripurna untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Demikian pandangan akhir mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan perlindungan, keamanan dan ketertiban bagi seluruh warga negara Indonesia.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc, M.A.

H. Sukamta, Ph.D.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Pak Ketua menyampaikan pandangan akhir mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Selanjutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kepada saudara Arwani Thomafi kami persilakan.

F-PPP (MOH. ARWANI THOMAFI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Pendapat Akhir Mini
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand
tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*agreement between government of Republik of
Indonesia and Government of the Kingdom of Thailand on corporation in the field of
defence*)**

Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Senin 26 Maret 2018 oleh juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI Arwani Thomafi No Anggota 523.

**Yang kami hormati Pimpinan Sidang, Pimpinan Komisi I DPR RI dan para Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur *alhamdulillah*, karena atas perkenan Allah kita dapat melangsungkan Rapat Kerja hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarga serta para sahabat pengikutnya.

Setelah mendengarkan penjelasan Pemerintah dalam pembahasan RUU kali ini. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut.

Pertama, Fraksi PPP menyatakan bahwa RUU ini sangat diperlukan untuk meningkatkan ketertiban dunia khususnya di Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Kedua, persetujuan ini akan memperkuat promosi industri pertahanan kita. Fraksi PPP juga berharap nantinya industri pertahanan lain, sektor yang lain juga memperoleh peluang serupa dalam hubungannya dengan negara Thailand.

Ketiga, Fraksi PPP melihat bahwa pengesahan persetujuan kerjasama dengan Thailand ini dapat memperkuat kerjasama teknis kemiliteran dan diplomasi pertahanan dengan Thailand. Kerjasama ini diperlukan untuk memperkuat langkah-langkah membangun kepercayaan, baik dengan Thailand secara langsung maupun dengan sekutu pertahanan Thailand dari negara besar. Hal ini juga akan mereduksi ancaman pertahanan dan keamanan terhadap Indonesia terutama karena meningkatnya tensi dikawasan Samudra Pasifik, Samudra Hindia serta Laut Cina Selatan.

Keempat, Fraksi PPP berharap Pemerintah dapat memperluas kerjasama dalam operasi bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana alam. Bentuk kerjasama ini dapat dilakukan dengan optimalkan ruang lingkup kerjasama pada Pasal 2 Angka 7 yaitu, kerjasama dalam bidang lain yang disepakati Bersama oleh para pihak.

Akhirnya dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama dibidang Pertahanan untuk disahkan dalam bentuk Undang-Undang.

Demikianlah Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI. Atas perhatian Pimpinan Sidang, para Menteri dan Anggota Komisi I DPR RI kami ucapkan terima kasih.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI

Kapoksi I

Arwani Thomafi

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bapak Arwani Thomafi.
Selanjutnya Fraksi Partai Nasdem Prof. Bachtiar.

F-NASDEM (PROF. Dr. BACHTIAR ALY, M.A.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, para Menteri yang saya muliakan.

Izinkan saya atas nama fraksi saya ditandatangani lengkap oleh Pimpinan Fraksi untuk menyatakan bahwa setelah mendengar begitu banyak pandangan, pikiran, saran, maka Fraksi Partai Nasdem tegas menyatakan menerima ini untuk bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya dan Rancangan Undang-Undang ini untuk disahkan di Rapat Paripurna.

Demikian dan izinkan saya untuk menyerahkan dokumen resminya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Silakan Prof. diserahkan.
Terima kasih Prof. Bachtiar Aly.
Yang terakhir Fraksi Partai Hanura kepada mas Arief Suditomo kami persilakan.

F-HANURA (MOHAMAD ARIEF SUDITOMO, S.H., M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Secara singkat dari Fraksi kami saya tidak ingin membacakan dari awal sampai akhir. Saya akan singkat saja, berdasarkan pertimbangan dari Fraksi kami maka Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan atau *agreement between government of Republik Of Indonesia and Government of the Kingdon of Thailand on corporation in the field of defence*. Untuk dapat diambil keputusan dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan serta Tata Tertib DPR RI.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Hanura DPR RI kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 26 Maret 2018

Pimpinan Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kapoksi Fraksi Hanura DPR RI

Moh. Arief Suditomo, S.H., M.A.

A-550

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Mas Arief Suditomo yang sudah menyampaikan dari Fraksi Hanura.

Kesepuluh Fraksi sudah menyampaikan pandangan atau Pendapat Akhir Mini fraksinya masing-masing. Dan setelah kami mendengarkan keseluruhan fraksi, bisa kita simpulkan Pak Menteri bahwa kesepuluh fraksi di Komisi I DPR RI dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama dibidang Pertahanan untuk selanjutnya dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Saya ketok untuk ini ya.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri Pertahanan yang mewakili Pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhir Pemerintah terhadap RUU ini.
Silakan.

MENTERI PERTAHANAN (JENDERAL TNI (PURN) RYAMIZARD RYACUDU):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Ketua dan Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat yang mewakili Menteri Luar Negeri dan Menteri Kum HAM,
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menyelesaikan rapat ini dengan tertib dan baik.

Pada kesempatan yang baik ini kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, karena dengan kesungguhan dan semangat kebersamaan maka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembahasan tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan untuk diteruskan ke tahap selanjutnya.

Demikian penyampaian pendapat akhir mini Presiden dan atas perhatian Ketua dan Anggota Komisi I DPR RI, kami semua mengucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, serta berguna bagi kemajuan bangsa dan negara yang sangat kita cintai Bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.PP.):

Terima kasih Bapak Menteri Pertahanan yang sudah menyampaikan pendapat akhir Pemerintah. Dan seperti yang kita dengar semuanya bahwa Pemerintah juga menyetujui RUU ini untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan telah selesainya pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama dibidang Pertahanan.

Dan setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pendapat akhir Pemerintah, maka sekali lagi kami minta persetujuan kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat dan Pemerintah apakah RUU ini bisa kita setujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang di pembicaraan tingkat II?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah kita rapat disini 2,5 jam kira-kira perjalanan Jakarta-Bangkok juga 2,5 jam. Jadi sambil terbang mendarat Undang-Undang-nya selesai ini.

Dengan disetujuinya Undang-Undang tersebut, maka kita lanjutkan pada agenda terakhir diujung acara ini, yaitu penandatanganan naskah RUU dan naskah penjelasan.

Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu perwakilan fraksi-fraksi dan juga Bapak Menteri Pertahanan, dari Kemenlu yang mewakili, maupun dari Kemenkum HAM yang mewakili untuk nanti maju kedepan guna menandatangani Bersama naskah RUU dan naskah penjelasan yang telah kita setujui Bersama baru saja.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Dengan akan ditandatanganinya naskah RUU dan naskah penjelasan ini, maka agenda tunggal kita Rapat Kerja untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan berakhir. Dan tentu dengan mengucapkan *alhamdulillahirabil'amin* semoga keputusan pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kemajuan bangsa kita dan juga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semuanya.

Dengan demikian rapat saya tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.45 WIB)

Jakarta, 26 Maret 2018
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001